BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan *Force Majeur* dalam perjanjian (Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb) tersebut adalah Pasal 1244 KUHPerdara mengatur bahwa jika ada alasan untuk itu, Pasal 1245 KUHPerdara mengatur bahwa tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, jika lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak sengaja kreditur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Meskipun KUHPerdara tidak memberikan pengertian *Force Majeur*., Contoh: Covid-19. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, tidak serta debitor dapat menunda atau membatalkan perjanjian.
- 2 .Penyelesaian Dari penjelasan diatas, dalam Putusan Nomor **29/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb**. Pengusaha berdalih tidak dapat dibayarkannya kewajiban dari si pengusaha dikarenakan Covid-19 itu tidak bisa diterapkan dalam keadaan memaksa (*Force Majeur*) dikarenakan telah jelas dari beberapa Pasal tersebut tidak terpenuhinya sebagai syarat terealisasinya *Force Majeur*, selain itu terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana

Nasional, dimana poin pertama secara tegas menyatakan sebagai bencana Nasional dapat dinyatakan bukan sebagai *Force Majeur*, sehingga penyelesaian yang harus dilakukan yaitu Pengusaha harus membayarkan hak-hak normatif sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat secara tunai, sebagai memenuhinya hak –hak dari penggugat.pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan adalah “upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan.” Seharusnya sesuai dengan amanah Pasal 94 mengatur bahwa: “ dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upak pokok dan tunjangan tetap”.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah lebih memperjelas pengaturan mengenai *Force Majeur*, karena tidak adanya pengertian secara khusus tentang *Force Majeur* yang diatur didalam perundang-undangan sehingga menimbulkan banyak penafsiran dan pendapat-pendapat oleh pakar hukum mengenai pengertian *Force Majeur*.
2. Klausul *Force Majeur* harus dicantumkan dalam setiap perjanjian yang dikeluarkan oleh para pihak agar dapat menyelamatkan para pihak dari peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam *Force Majeur*.